



DPRKPLH
Kabupaten Temanggung

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tahun 2025–2029



Disusun oleh:

**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung**

JALAN GERILYA NOMOR 20 MARON SIDOREJO TEMANGGUNG
KODE POS 56221 - TELEPON / FAXIMILI (0293) 4901569
SURAT ELEKTRONIK : dprkplh.temanggungkab@gmail.com

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

Disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025-2029**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada Tanggal : 19 September 2025

Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam,
dan Infrastruktur


ADI WIBOWO, S.T.
NIP. 198111012009031003

Petugas Verifikator,


ELMA JANE YOLANDA P., S.P.W.K.
NIP. 199702042022022001

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

DR. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud nyata komitmen DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini disusun sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tentang penyusunan dokumen perencanaan strategis instansi pemerintah.

Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai pedoman arah pembangunan kelembagaan selama lima tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja utama. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya serta berbagai dinamika dan tantangan lingkungan strategis yang dihadapi di masa mendatang.

Proses penyusunan Renstra ini dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), baik internal maupun eksternal. Analisis terhadap kondisi aktual dan isu-isu strategis menunjukkan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks. Perkembangan teknologi, perubahan sosial-ekonomi, dinamika lingkungan global, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas, menuntut adanya transformasi birokrasi dan inovasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan formal, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong reformasi dan inovasi kelembagaan dalam menghadapi era perubahan.

Melalui Renstra Tahun 2025–2029 ini, DPRKPLH Kabupaten Temanggung bertekad untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta memperluas kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan dokumen Renstra ini dalam rangka mendukung Tujuan DPRKPLH Kabupaten Temanggung yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman serta ketahanan terhadap perubahan iklim.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan tantangan. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, data, dan masukan konstruktif dalam proses penyusunannya mulai dari jajaran pimpinan, pejabat struktural dan fungsional, staf teknis, hingga para mitra kerja dan masyarakat.

Akhirnya, besar harapan kami agar Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 ini dapat dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan program dan kegiatan secara konsisten, terukur, dan berkesinambungan. Semoga dengan kerja keras, komitmen, dan sinergi bersama, kita mampu mewujudkan cita-cita pembangunan menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab.

Temanggung, 19 September 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung,



PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196604021989031013

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	23
2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah	25
2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	36
2.3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.3.2 Isu Strategis	38
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	41
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	41
3.2 Strategi	44
3.3 Arah Kebijakan	50
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	55
BAB V PENUTUP	135

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Personil dan Tata Laksana DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	26
Tabel 2.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	27
Tabel 2.3	Capaian indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Pekerjaan Umum.....	29
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	30
Tabel 2.5	Capaian indikator kinerja kunci DPRKPLH.....	33
Tabel 2.6	Permasalahan dan Isu Strategis.....	39
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung	43
Tabel 3.4	Pentahapan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	45
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	51
Tabel 4.1	Program DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	56
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	66
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	77
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung.....	122
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	126
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	131

Tabel 4.7	Program Delegasi Provinsi ke Kabupaten	
	Temanggung.....	133
Tabel 4.8	Mandatory Pusat	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	24
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	42
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	42
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

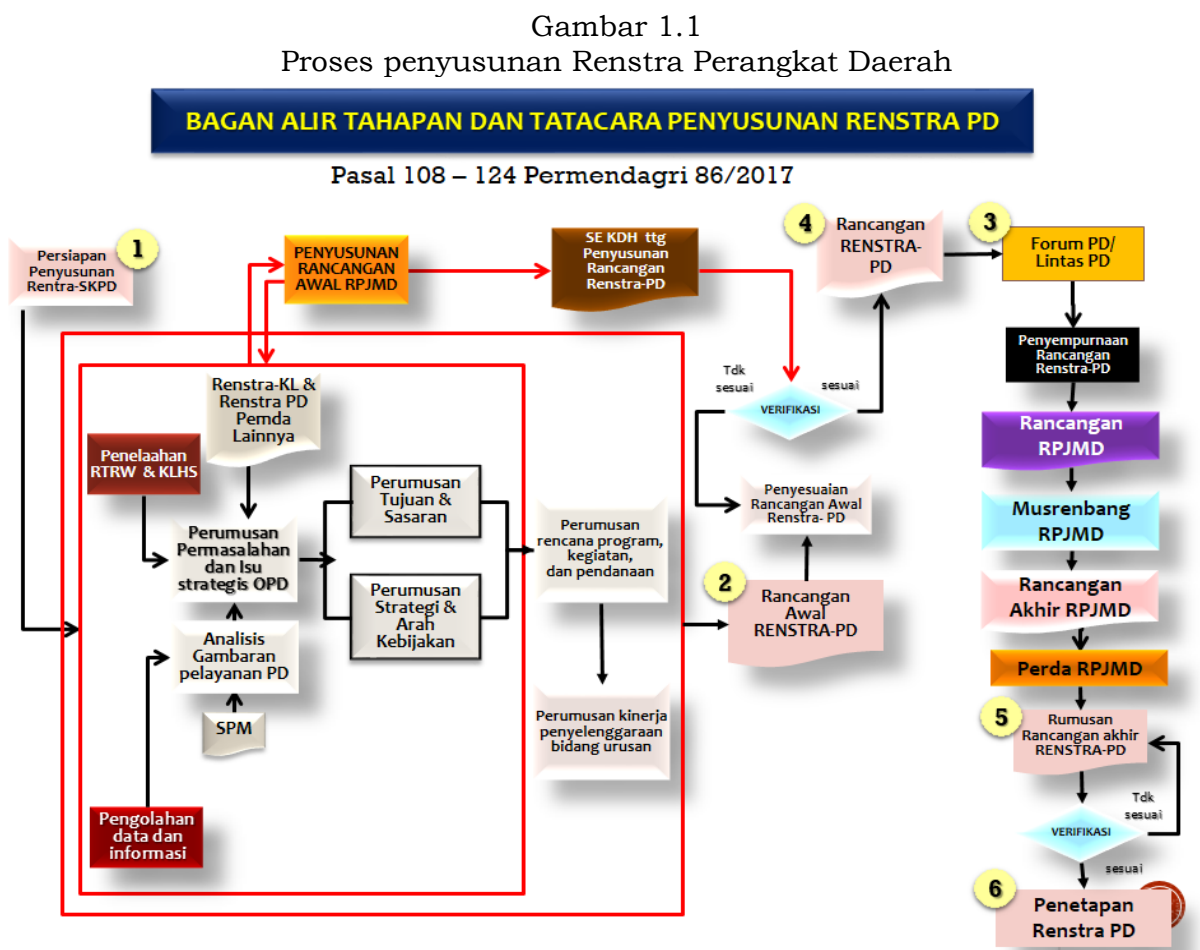
1.1. Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. DPRKPLH Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Keberadaan DPRKPLH Kabupaten Temanggung menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang

lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Pembangunan pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan keberlanjutan pembangunan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah berikut :
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan serta urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah :

- a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
- c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah .
- d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra perangkat daerah.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah Paling sedikit memuat :

- a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah
- b. Sumber daya perangkat daerah
- c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d. Kelompok sasaran layanan

2. Sub bab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:

- a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
- b. Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra DPRKPLH telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, DPRKPLH Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, DPRKPLH Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;

2. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Koordinator Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. Sub Koordinator Pengembangan Perumahan; dan
 - b. Sub Koordinator Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
4. Kepala Bidang Tata Lingkungan
 - a. Sub Koordinator Analisa Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Koordinator Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup.
5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan

- b. Sub Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.
- 6. Kepala Bidang Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan
 - a. Sub Koordinator Kebersihan; dan
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan Persampahan.
- 7. Kepala UPT Rusunawa;
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Rusunawa
- 8. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan;
- 9. Kepala UPT Pengelolaan TPA - IPLT.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan TPA-IPLT
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut:

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Kepala Dinas melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas Sub Bagian dan Sub Koordinator.

Sub Bagian terdiri atas:

- a. Sub Bagian Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Koordinator terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator Perencanaan.

Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan. Tugas Sub Bagian Keuangan meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- c. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;

- c. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan dinas;
- g. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan dinas;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, standar pelayanan, zona integritas, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai dinas;
- k. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, survei kepuasan masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas Bidang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dibantu oleh Sub Koordinator yaitu:

- a. Sub Koordinator Pengembangan Perumahan; dan
- b. Sub Koordinator Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

2.1.1.4 Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan, pemeliharaan lingkungan hidup dan kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Lingkungan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan,

- pemeliharaan lingkungan hidup dan kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup;
- b. Penyusunan rencana dan program bidang tata lingkungan;
 - c. Penyusunan dan penetapan muatan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
 - d. Perumusan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan rencana dan program kabupaten;
 - e. Perumusan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. Perumusan pemetaan kebijakan rencana dan program yang potensial menimbulkan dampak lingkungan;
 - g. Perumusan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - h. Perumusan kebijakan pengembangan data dan informasi lingkungan;
 - i. Perumusan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - j. Perumusan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan hidup);
 - k. Perumusan pemetaan dan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan penanggulangan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - l. Perumusan kebijakan perizinan di bidang lingkungan hidup;
 - m. Pelaksanaan kegiatan penataan taman milik pemerintah daerah, pengawasan pertamanan, pengelolaan peralatan, perlengkapan pertamanan, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas penataan taman;

- n. Perumusan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- o. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan analisa/kajian lingkungan hidup, pertamanan pemeliharaan lingkungan hidup serta kelembagaan dan pemberdayaan lingkungan hidup; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Tata Lingkungan dapat dibantu oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Sub Koordinator Analisa Lingkungan Hidup;
- b. Sub Koordinator Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
- c. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup.

2.1.1.5 Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran di bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;

- c. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- e. Perumusan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan;
- f. Perumusan kebijakan penyelesaian aduan kasus lingkungan hidup;
- g. Perumusan kebijakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- h. Pelaksanaan pelayanan di bidang pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. Pelaksanaan pelayanan di bidang penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dapat dibantu oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- b. Sub Koordinator Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.

2.1.1.6 Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan. Dalam melaksanakan tugas Bidang

Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan dapat dibantu oleh Sub Koordinator, yaitu:

- a. Sub Koordinator Kebersihan; dan
- b. Sub Koordinator Pengelolaan Persampahan.

2.1.1.7 Tugas, Pokok dan Fungsi UPT Rusunawa

UPT Rusunawa mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan Rusunawa. Dalam melaksanakan tugas UPT Rusunawa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Rusunawa;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan Rusunawa;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pengelolaan Rusunawa; dan

f. Penyelenggaraan penatausahaan UPT Rusunawa.

Kepala UPT Rusunawa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT Rusunawa yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan Rusunawa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala UPT Rusunawa dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Rusunawa yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.8 Tugas, Pokok dan Fungsi UPT Laboratorium Lingkungan

UPT Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Laboratorium Lingkungan;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengujian, pendidikan dan pelatihan teknis Laboratorium Lingkungan;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;

- f. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- g. Pelaksanaan validasi atau verifikasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan; dan
- h. Penyelenggaraan penatausahaan UPT Laboratorium Lingkungan.

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Lingkungan yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan Laboratorium Lingkungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.9 Tugas, Pokok dan Fungsi UPT Pengelolaan TPA-IPLT

UPT Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan TPA dan IPLT. Dalam melaksanakan tugas UPT Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Pengelolaan TPA-IPLT;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengolahan dan penataan TPA-IPLT
- c. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Pengelolaan TPA-IPLT; dan

- f. Penyelenggaraan penatausahaan UPT Pengelolaan TPA-IPLT.

Kepala UPT Pengelolaan TPA-IPLT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan TPA-IPLT yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, pengolahan, penataan dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengelolaan TPA-IPLT serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pengelolaan TPA-IPLT dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan TPA-IPLT yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

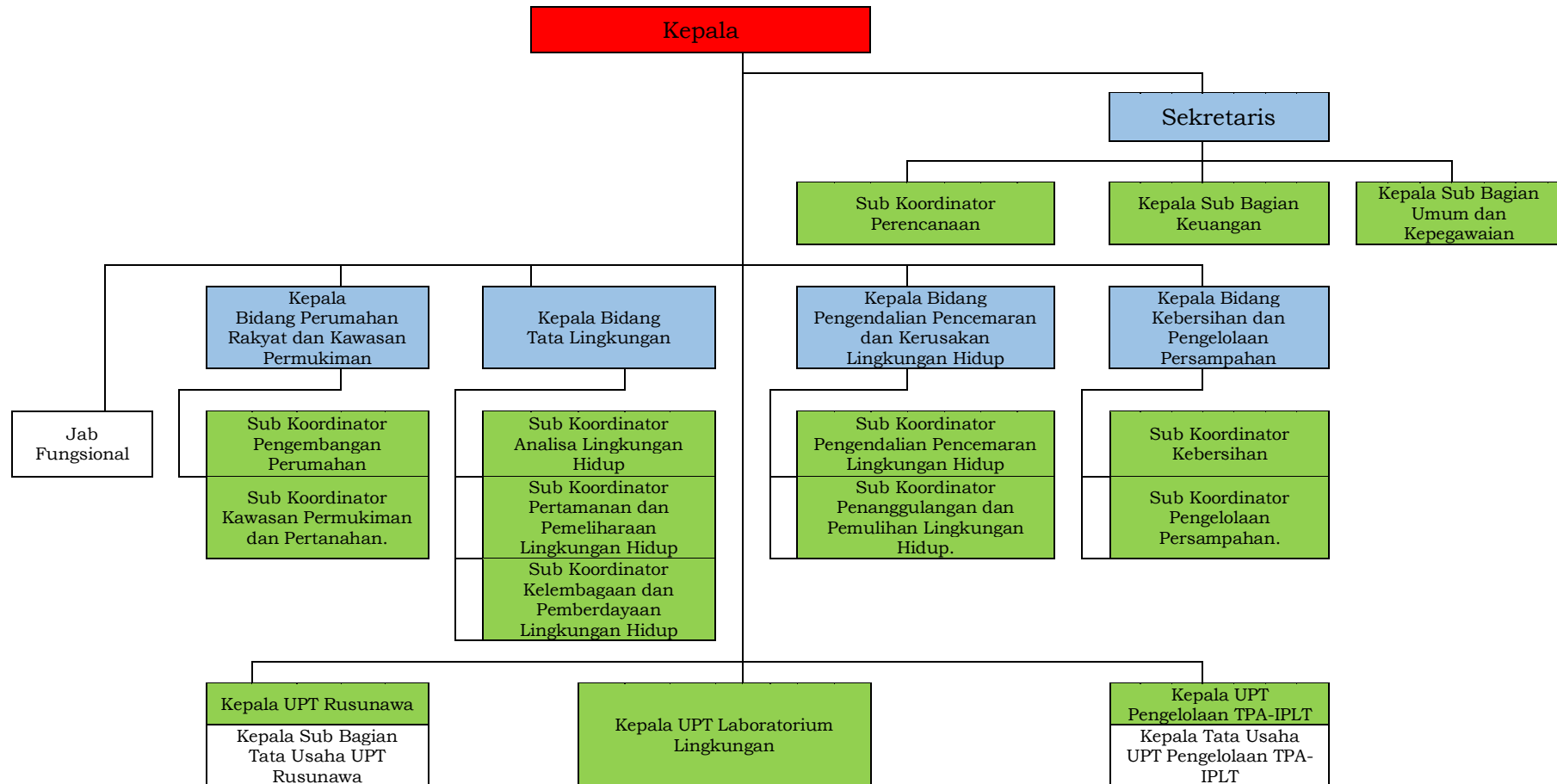
2.1.1.10 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam pada gambar struktur organisasi DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung



2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana DPRKPLH Kabupaten Temanggung

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)									GOLONGAN/ PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1																	
Eselon 2								1					1			1	1
KEPALA PERANGKAT DAERAH								1					1			1	1
Eselon 3								4				1	3			1	1
SEKRETARIS																	
KEPALA BIDANG								4				1	3			1	1
Eselon 4						1	3	1				6	1				1
KEPALA SUB BAGIAN						1		1				1	1				1
KEPALA UPT							1	2				3					
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA							2					2					
SUB KOORDINATOR							3	2				5					
FUNGSIONAL TERTENTU						2	8				3	8					
FUNGSIONAL UMUM	27	23	35			2	6			6	77	10					
PPPK							3										
JUMLAH	124									124				4			

2.1.3.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparat sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	JUMLAH ASET	NILAI ASET	KETERANGAN
1	Tanah	0	18.215.385.057,00	
	Tanah	0	18.215.385.057,00	
2	Peralatan Dan Mesin	1.294	4.821.170.701,39	
	Alat Besar	24	1.436.441.913,56	
	Alat Angkutan	152	1.798.823.185,71	
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	43	96.577.290,00	1 GPS Rusak
	Alat Pertanian	20	24.150.000,00	
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	779	292.420.186,10	
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	21	16.435.075,00	1 UPS Rusak
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4	813.400,00	
	Alat Laboratorium	153	1.067.620.188,51	1 Blender Rusak 1 PH Meter Rusak 1 Conductivity Meter Rusak 1 Tabung Detruksi Rusak
	Alat Persenjataan	3	26.000.000,00	
	Komputer	79	37.583.462,50	3 P.C Unit Rusak 1 Laptop Rusak
	Alat Keselamatan Kerja	16	24.306.000,00	
3	Gedung dan Bangunan	3	93.111.547.845,83	

NO	URAIAN	JUMLAH ASET	NILAI ASET	KETERANGAN
	Bangunan Gedung	3	93.098.197.845,83	
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	13.350.000,00	
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	3.203.107.237,44	
	Jalan dan Jembatan	0	663.465.649,98	
	Bangunan Air	0	242.954.622,00	
	Instalasi	0	1.823.600.212,13	
	Jaringan	0	473.086.753,33	
5	Aset Tetap Lainnya	0	1.083.155.700,00	
	Bahan Perpustakaan	0	39.100.000,00	
	Tanaman	0	1.044.055.700,00	
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	47.622.000,00	
	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	47.622.000,00	
	Akumulasi Penyusutan	0	0	
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4.821.170.701,39	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	93.111.547.845,83	
	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	3.203.107.237,44	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1.083.155.700,00	
	Jumlah Aset Tetap	0	120.481.988.541,66	
7	Aset Lainnya			
	Aset Tidak Berwujud	0	30.903.125,00	
	Aset Tidak Berwujud	0	30.903.125,00	Baik
	Jumlah Aset Lainnya	0	30.903.125,00	
8	Barang Ekstrakomptabel	4.841	500.676.106,67	4 Mesin Bor Rusak
	Jumlah Ekstrakomptabel		388.022.351,67	
9	Barang Persediaan			
	Persediaan	222	112.231.796,00	
	Barang Pakai Habis	222	112.231.796,00	
	Jumlah Persediaan	222	112.231.796,00	
	TOTAL	0	121.013.145.814,33	

2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, DPRKPLH Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra Tahun 2025–2029.

2.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.3
Capaian indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat dan
Bidang Pekerjaan Umum

No	Indikator SPM	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	-	100	100	100	100	
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	-	100	100	100	100	
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	-	92,38	100	100	100	

Berdasarkan Tabel 2.3. diketahui bahwa data yang tersedia mulai tahun 2021-2024 dengan capaian kondisi terakhir sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama DPRKPLH

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN					KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
A.	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018-2023						
1.	Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	100	100	100	100	-	
2.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	100	100	100	100	-	
3.	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	100	100	100	100	-	
4.	Persentase rumah layak huni	100	100	100	100	-	
5.	Persentase kawasan kumuh perkotaan	100	100	100	100	-	
6.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Na	100	100	100	-	
7.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Na	100	100	100	-	
8.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Na	92,38	100	100	-	
9.	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	100	100	100	100	-	
10.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	96,94	100	100	100	-	
11.	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	55,60	100	100	100	-	
12.	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup	Na	Na	100	100	-	
13.	Indeks Kualitas Air	97,88	100	100	100	-	
14.	Indeks Kualitas Udara	98,99	95,16	98,04	98,95	-	
15.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	100	100	100	100	-	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN					KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
16.	Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung	100	100	100	100	-	
17.	Cakupan RTH Publik	100	100	100	100	-	
18.	Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	Na	Na	100	100	-	
19.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	Na	100	100	100	-	
20.	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	Na	100	100	100	-	
21.	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	Na	100	100	100	-	
22.	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	-	
23.	Persentase sampah yang tertangani	75,71	91,32	100	100	-	
24.	Cakupan layanan persampahan	Na	100	100	100	-	
B.	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026						
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	100	
2.	Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	-	-	-	-	100	
3.	Indeks Kualitas Air (IKA)	-	-	-	-	100	
4.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	-	-	-	100	
5.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	-	-	-	-	100	
6.	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	-	-	-	-	100	
7.	Persentase rumah layak huni	-	-	-	-	100	
8.	Persentase kawasan kumuh perkotaan	-	-	-	-	100	

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN					KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	2024	
9.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	-	-	-	-	100	
10.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	-	-	-	-	100	
11.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	-	-	-	-	100	
12.	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	-	-	-	-	100	
13.	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	-	-	-	-	100	
14.	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	100	
15.	Indeks Kualitas Air	-	-	-	-	100	
16.	Indeks Kualitas Udara	-	-	-	-	100	
17.	Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	-	-	-	-	100	
18.	Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	-	-	-	-	100	
19.	Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3	-	-	-	-	100	
20.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	-	-	-	-	100	
21.	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	-	-	-	-	100	
22.	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	-	-	-	-	100	
23.	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	100	
24.	Persentase sampah yang tertangani	-	-	-	-	100	
25.	Cakupan Pelayanan persampahan	-	-	-	-	100	

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa seluruh indikator pada DPRKPLH sebagai berikut:

- a. Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 terdapat 1 indikator yang tidak tercapai yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU) yang disebabkan karena :
 - Pengambilan titik sampel dilakukan di 4 (empat) lokasi yaitu pada kawasan perkantoran, perindustrian, permukiman, dan transportasi. Berdasarkan hasil laboratorium(1), perhitungan pada kawasan perindustrian mengalami kenaikan NO₂ dari 10,73 µg/Nm³ menjadi 15,18 µg/Nm³ yang disebabkan karena perlakuan dalam operasional boiler pabrik industri tidak sesuai dengan standar operasional prosedur
 - Pengambilan sampel dilakukan pada musim kemarau yang secara tidak langsung mempengaruhi kondisi partikel udara. Musim kemarau tahun 2023 lebih awal apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, selain itu kondisi suhu yang lebih panas dan lebih kering akan berdampak pada kondisi lingkungan antara lain debu yang berterbangan terbawa angin yang mempengaruhi kualitas udara.
- b. Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 seluruh indikator dapat tercapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.5
Capaian indikator kinerja kunci DPRKPLH

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh	77,35%	86,29%	82,38%	90,63%	2,30%	

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	layanan pengolahan air limbah domestik						
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	25,87%	100	100%	100%	0%	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	71,06%	29,00%	31,34%	0%	0%	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	11,26%	8,57%	5,24%	4,49%	3,7%	
5	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	100%	100%	99,25%	100%	
7	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	100%	50%	100%	0%	
8	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	14,43%	100%	100%	100%	100%	
9	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0%	0%	100%	100%	0%	
10	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0%	100%	100%	n.a	0%	
11	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	0%	
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	62,04	69,51	69,86	74,83	68,25	
13	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	49,75%	21,97%	59,06%	61,26%	62,90%	
14	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin	30%	6%	4%	4%	12%	

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
	PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten						

2.1.1.2 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPRKPLH Kabupaten Temanggung memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Penilaian Dokumen AMDAL
2. Standar Pelayanan Formulir UKL-UPL
3. Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
4. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
5. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Udara Emisi
6. Penebangan Pohon Ayoman dan Pembongkaran Taman
7. Standar Pelayanan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
8. Pengesahan Siteplan Perumahan
9. Pelayanan Pengambilan Sampah
10. Pelayanan Pembayaran RKK (Retribusi Kebersihan Kota)
11. Pengelolaan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa)
12. Pelayanan Uji Kualitas Lingkungan
13. Menyedot Lumpur Tinja
14. Pelayanan Izin Penggunaan Pendopo Relawan.

Selain kelompok sasaran layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka

DPRKPLH Kabupaten Temanggung juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait antara lain:

1. Instansi Pemerintah (Dinas, Badan, Kecamatan, Kelurahan, Pememerintaha Desa)
2. Rumah Sakit/Puskesmas
3. Sekolah/Dunia Pendidikan
4. PLN
5. PDAM Kabupaten Temanggung dalam mendukung penyediaan sanitasi layak dan aman bagi warga masyarakat Kabupaten Temanggung
6. Perusahaan
7. BUMDes di Kabupaten Temanggung dalam mendukung penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung
8. Organisasi Kemasyarakatan, Relawan, dll.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh DPRKPLH antara lain:

1. Masih terdapat rumah tidak layak huni di Kabupaten Temanggung

2. Terdapat backlog perumahan
3. Belum adanya acuan pemerintah daerah untuk menangani permukiman kumuh
4. Masih adanya kawasan kumuh di Kabupaten Temanggung
5. Belum optimalnya fasilitasi penyelesaian tanah obyek reforma agraria (TORA)
6. Rendahnya akses sanitasi layak dan aman di Kabupaten Temanggung
7. Belum optimalnya pendampingan peningkatan PSU perdesaan dan perkotaan
8. Belum adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Penunjang kegiatan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (ASN, Non ASN, TFL, KSM, Perangkat Desa, dll)
9. Belum optimalnya penerapan standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum (Sanitasi) dan Perumahan Rakyat
10. Peningkatan kualitas pelayanan lingkungan permukiman
11. Kemudahan investasi
12. Pengelolaan RTH Perkotaan
13. Indeks kualitas lingkungan hidup
14. Luasan lahan kritis
15. Emisi gas rumah kaca (GRK)
16. Pelestarian sumber mata air
17. Pengelolaan sampah yang belum optimal
18. Kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa dalam pengelolaan persampahan
19. Rendahnya tingkat pengurangan sampah dari sumbernya
20. Pelayanan pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa yang belum optimal
21. Belum optimalnya tata kelola Rumah Susun Sederhana Sewa milik Pemerintah Daerah
22. Kelayakan Infrastruktur prasarana, sarana, dan utilitas umum Rusunawa

23. Belum ada Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi di Kabupaten Temanggung
24. Capaian sanitasi aman yang masih jauh dari target
25. Belum tersedianya temporary landfill pada saat pembangunan TPST
26. Belum tersedianya tenaga operasional terlatih pada TPST
27. Belum optimalnya operasional pengelolaan sampah residu di TPST.

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung. Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Temanggung memiliki ketersediaan lahan dan sumber daya alam yang memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat dan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan	1. Penyediaan infrastruktur di Kabupaten Temanggung belum merata dan belum sesuai dengan standar yang ditentukan 2. Belum meratanya penyediaan perumahan 3. Belum tertanganinya kawasan permukiman kumuh secara optimal 4. Akses sanitasi aman masih rendah 5. Pengelolaan sampah di masyarakat belum optimal 6. Luasan ruang terbuka hijau permukiman terbatas 7. Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan bencana yang tangguh pada kawasan permukiman	Peningkatan Layanan Akses Dasar dan Sanitasi	1. Peningkatan akses air baku yang aman dan adil untuk semua 2. Peningkatan akses dan kualitas sanitasi yang memadai untuk semua 3. Infrastruktur persampahan belum optimal	Pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air	Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan dalam mewujudkan perumahan dan permukiman layak huni

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Kabupaten Temanggung berada di bagian hulu Jawa Tengah, sehingga mempunyai posisi penting dalam menjaga konservasi dan keseimbangan sumber daya alam. Temanggung memiliki potensi yang tinggi terhadap sumber daya air yaitu terdapat hampir seribu mata air	1. Kualitas Lingkungan di Kabupaten Temanggung menurun, khususnya pada kualitas lahan 2. Belum optimalnya upaya penanganan lahan kritis 3. Masih rendahnya akses sanitasi aman yang berkelanjutan 4. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya air belum optimal 5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup ramah lingkungan 6. Pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung belum optimal 7. Kapasitas daerah dalam manajemen kebencanaan masih belum optimal	Peningkatan Alih Fungsi Lahan dan Risiko Bencana	Pelestarian dan perlindungan sumber daya alam Pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir	Krisis Lingkungan: Tiga Krisis Lingkungan (triple planetary crisis) yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan	Ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup Peningkatan intensitas bencana dan ancaman perubahan iklim	Keberlanjutan Lingkungan Hidup Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

BAB III

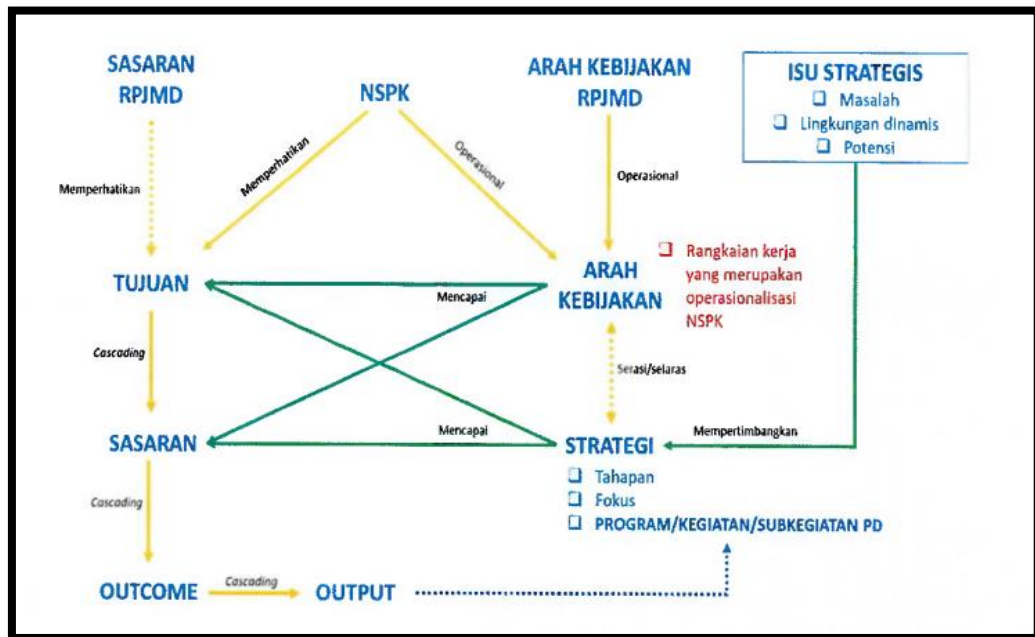
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

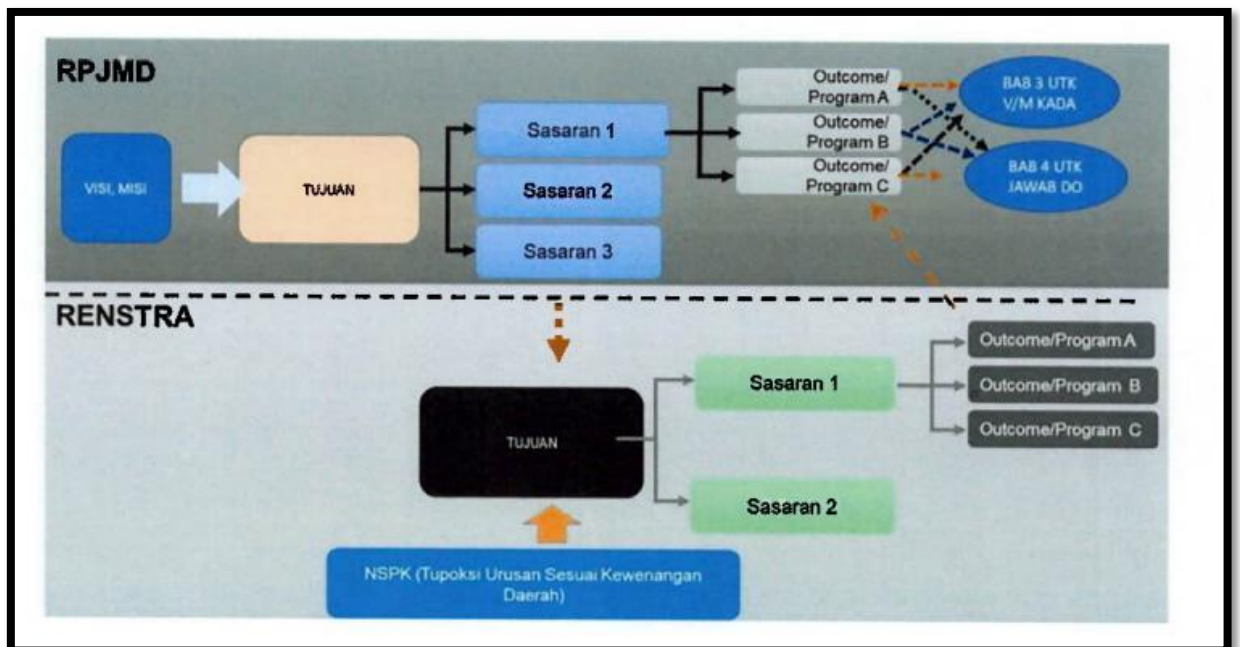
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan DPRKPLH Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama DPRKPLH Kabupaten Temanggung serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.04.2.11.1.03.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup											
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman serta ketahanan terhadap perubahan iklim		Indeks Kualitas Air (IKA) (Angka)	59,63	74,17	74,27	74,37	74,47	74,57	74,67	
			Indeks Kualitas Udara (IKU) (Angka)	87,84	85	85,01	85,02	85,03	85,04	85,05	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	78,14	78,5	79	79,5	80	80,5	81	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	71,9	74,5	75	75,5	76	76,5	77	
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (TON CO2 EQ)	690.921,63	793.727,99	1.129.065,77	1.464.403,55	1.799.741,33	2.135.079,11	2.470.416,89	
Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan		Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman (%)	70,83	71,7	72,47	73,24	74,01	74,78	75,29	

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung

NO	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
1	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
a.	Penyediaan/Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota	Penyediaan/Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota	Penyediaan/Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota	Penyediaan/Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota	Penyediaan/Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota
b.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
c.	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Perencanaan Relokasi Program Kabupaten/Kota	Perencanaan Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pengadaan Tanah untuk Relokasi
d.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Perencanaan Relokasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Perencanaan Relokasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pengadaan Tanah untuk Relokasi
e.	Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh	Penanganan Kawasan Kumuh	Penanganan Kawasan Kumuh
2	BIDANG TATA LINGKUNGAN				
a	Penyusunan DED Alon-alon Temanggung	Pembangunan Alon-alon Tahap I	Pembangunan Alon-alon Tahap II		
b	Penyusunan DED dan Pembangunan Pagar Pendopo				
c	Penyusunan Perbup Perlindungan dan Pengelolaan Pohon pada ruang terbuka hijau publik	Pemeliharaan Rutin RTH Publik dan Taman Kota	Pemeliharaan Rutin RTH Publik dan Taman Kota	Pemeliharaan Rutin RTH Publik dan Taman Kota	Pemeliharaan Rutin RTH Publik dan Taman Kota
d	Pengadaan Skylift				
e	Perbaikan Jam dan air mancur di Tugu Pancasila Temanggung				
f	Pemeliharaan Rutin RTH Publik dan Taman Kota				
g	Penyusunan Dokumen IKPLHD	Penyusunan Dokumen IKPLHD	Penyusunan Dokumen IKPLHD	Penyusunan Dokumen IKPLHD	Penyusunan Dokumen IKPLHD

NO	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
h	Fasilitasi Persetujuan Lingkungan	Fasilitasi Persetujuan Lingkungan	Fasilitasi Persetujuan Lingkungan	Fasilitasi Persetujuan Lingkungan	Fasilitasi Persetujuan Lingkungan
i	Penyusunan KLHS RDTR		Penyusunan KLHS Review RTRW		
j	Penyusunan Perbup Perlindungan dan Pengelolaan Pohon pada ruang terbuka hijau publik				
k	Pengusulan Penghargaan Kalpataru	Pengusulan Penghargaan Kalpataru	Pengusulan Penghargaan Kalpataru	Pengusulan Penghargaan Kalpataru	Pengusulan Penghargaan Kalpataru
l	Pengusulan Pogram Kampung Iklim	Pengusulan Pogram Kampung Iklim	Pengusulan Pogram Kampung Iklim	Pengusulan Pogram Kampung Iklim	Pengusulan Pogram Kampung Iklim
m	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Propinsi	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Propinsi	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Propinsi	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Propinsi	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Propinsi
n	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Nasional	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Nasional	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Nasional	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Nasional	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Nasional
o	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Mandiri	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Mandiri	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Mandiri	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Mandiri	Pengusulan Sekolah Adiwiyata Mandiri
p	Pelaksanaan Seleksi Sekolah Adiwiyata Kabupaten	Pelaksanaan Seleksi Sekolah Adiwiyata Kabupaten	Pelaksanaan Seleksi Sekolah Adiwiyata Kabupaten	Pelaksanaan Seleksi Sekolah Adiwiyata Kabupaten	Pelaksanaan Seleksi Sekolah Adiwiyata Kabupaten
q	Penyelenggaraan Program Bank Pohon	Penyelenggaraan Program Bank Pohon	Penyelenggaraan Program Bank Pohon	Penyelenggaraan Program Bank Pohon	Penyelenggaraan Program Bank Pohon
r	Pembinaan Bank Sampah	Pembinaan Bank Sampah	Pembinaan Bank Sampah	Pembinaan Bank Sampah	Pembinaan Bank Sampah
C	BIDANG PPKLH				
a	Operasional Pengujian Kualitas Air dan Udara	Operasional Pengujian Kualitas Air dan Udara	Operasional Pengujian Kualitas Air dan Udara	Operasional Pengujian Kualitas Air dan Udara	Operasional Pengujian Kualitas Air dan Udara
b	Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan kepada usaha/kegiatan untuk mencegah penurunan kualitas Air dan Udara	Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan kepada usaha/kegiatan untuk mencegah penurunan kualitas Air dan Udara	Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan kepada usaha/kegiatan untuk mencegah penurunan kualitas Air dan Udara	Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan kepada usaha/kegiatan untuk mencegah penurunan kualitas Air dan Udara	Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan kepada usaha/kegiatan untuk mencegah penurunan kualitas Air dan Udara
c	Optimalisasi Edukasi kepada Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	Optimalisasi Edukasi kepada Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	Optimalisasi Edukasi kepada Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	Optimalisasi Edukasi kepada Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	Optimalisasi Edukasi kepada Masyarakat tentang Lingkungan Hidup

NO	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
d	Kegiatan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan Penambahan ares hijau perkotaan untuk meningkatkan kualitas udara dan Tutupan Lahan	Kegiatan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan Penambahan ares hijau perkotaan untuk meningkatkan kualitas udara dan Tutupan Lahan	Kegiatan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan Penambahan ares hijau perkotaan untuk meningkatkan kualitas udara dan Tutupan Lahan	Kegiatan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan Penambahan ares hijau perkotaan untuk meningkatkan kualitas udara dan Tutupan Lahan	Kegiatan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan Penambahan ares hijau perkotaan untuk meningkatkan kualitas udara dan Tutupan Lahan
e	Sinergi Pengadaan Sarpras untuk mengurangi pencemaran air seperti pembangunan IPAL Domestik (Grey Water) Rumah Tangga, Biodigester Ternak, IPAL Batik	Sinergi Pengadaan Sarpras untuk mengurangi pencemaran air seperti pembangunan IPAL Domestik (Grey Water) Rumah Tangga, Biodigester Ternak, IPAL Batik	Sinergi Pengadaan Sarpras untuk mengurangi pencemaran air seperti pembangunan IPAL Domestik (Grey Water) Rumah Tangga, Biodigester Ternak, IPAL Batik	Sinergi Pengadaan Sarpras untuk mengurangi pencemaran air seperti pembangunan IPAL Domestik (Grey Water) Rumah Tangga, Biodigester Ternak, IPAL Batik	Sinergi Pengadaan Sarpras untuk mengurangi pencemaran air seperti pembangunan IPAL Domestik (Grey Water) Rumah Tangga, Biodigester Ternak, IPAL Batik
f	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan penanaman pohon dan bersih sungai untuk meningkatkan kualitas air dan udara	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan penanaman pohon dan bersih sungai untuk meningkatkan kualitas air dan udara	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan penanaman pohon dan bersih sungai untuk meningkatkan kualitas air dan udara	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan penanaman pohon dan bersih sungai untuk meningkatkan kualitas air dan udara	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan penanaman pohon dan bersih sungai untuk meningkatkan kualitas air dan udara
4	BIDANG KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
a	Pendampingan, optimalisasi, monitoring dan sosialisasi ke desa yang telah memiliki sarpras pengelolaan sampah dan kelembagaan pengelolaan sampah desa	Pendampingan, optimalisasi, monitoring dan sosialisasi ke desa yang telah memiliki sarpras pengelolaan sampah dan kelembagaan pengelolaan sampah desa serta bagi desa yang belum mematuhi Perbup No 42 dan 43 Tahun 2023	Pendampingan, optimalisasi, monitoring dan sosialisasi ke desa yang telah memiliki sarpras pengelolaan sampah dan kelembagaan pengelolaan sampah desa	Pendampingan, optimalisasi, monitoring dan sosialisasi ke desa yang telah memiliki sarpras pengelolaan sampah dan kelembagaan pengelolaan sampah desa	Pendampingan, optimalisasi, monitoring dan sosialisasi ke desa yang telah memiliki sarpras pengelolaan sampah dan kelembagaan pengelolaan sampah desa
b		Pengadaan sarpras pengelolaan sampah		Peremajaan armada pengelolaan sampah	Pengadaan sarpras pengelolaan sampah
c	Pelatihan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah ke desa yang telah memiliki sarpras (TPS3R/TPSD) dan desa yang belum mematuhi aturan	Pelatihan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah ke desa yang telah memiliki sarpras (TPS3R/TPSD) dan desa yang belum mematuhi aturan	Pelatihan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah ke desa yang telah memiliki sarpras (TPS3R/TPSD) dan desa yang belum mematuhi aturan	Pelatihan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah ke desa yang telah memiliki sarpras (TPS3R/TPSD) dan desa yang belum mematuhi aturan	Pelatihan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah ke desa yang telah memiliki sarpras (TPS3R/TPSD) dan desa yang belum mematuhi aturan

NO	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
d	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Pelatihan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah ke desa yang telah memiliki sarpras (TPS3R/TPSD) dan desa yang belum mematuhi aturan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
e	Penyusunan Perbup tentang Pengurangan Sampah dari Sumber	Adanya Perbup tentang Pengurangan Sampah dari Sumber	Sosialisasi dan implementasi Perbup tentang Pengurangan Sampah dari Sumber kepada masyarakat	Sosialisasi dan implementasi Perbup tentang Pengurangan Sampah dari Sumber kepada masyarakat	Sosialisasi dan implementasi Perbup tentang Pengurangan Sampah dari Sumber kepada masyarakat
5	UPT RUSUNAWA				
a	Operasional Rusunawa yang baik dan memadai	Operasional Rusunawa yang baik dan memadai	Operasional Rusunawa yang baik dan memadai	Operasional Rusunawa yang baik dan memadai	Operasional Rusunawa yang baik dan memadai
b	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung, Sarana dan Prasarana Rusun yang memadai	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung, Sarana dan Prasarana Rusun yang memadai	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung, Sarana dan Prasarana Rusun yang memadai	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung, Sarana dan Prasarana Rusun yang memadai	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung, Sarana dan Prasarana Rusun yang memadai
c		Pembangunan Tempat Parkir dan Tempat Sampah Rusun Kranggan 2 (Tahap 1)	Pembangunan Tempat Parkir dan Tempat Sampah Rusun Kranggan 2 (Tahap 2)	-	-
6	UPT LABORATORIUM				
a	Operasional laboratorium	Operasional laboratorium	Operasional laboratorium	Operasional laboratorium	Operasional laboratorium
b	Penyediaan bahan kimia dan peralatan laboratorium	Penyediaan bahan kimia dan peralatan laboratorium	Penyediaan bahan kimia dan peralatan laboratorium	Penyediaan bahan kimia dan peralatan laboratorium	Penyediaan bahan kimia dan peralatan laboratorium
c	Pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium	Pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium	Pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium	Pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium	Pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium
d	Peningkatan kompetensi personel sesuai persyaratan untuk laboratorium terakreditasi	Peningkatan kompetensi personel sesuai persyaratan untuk laboratorium terakreditasi	Peningkatan kompetensi personel sesuai persyaratan untuk laboratorium terakreditasi	Peningkatan kompetensi personel sesuai persyaratan untuk laboratorium terakreditasi	Peningkatan kompetensi personel sesuai persyaratan untuk laboratorium terakreditasi
e	Pemenuhan persyaratan untuk laboratorium terakreditasi dan teregistrasi	Pemenuhan persyaratan untuk laboratorium terakreditasi dan teregistrasi	Pemenuhan persyaratan untuk laboratorium terakreditasi dan teregistrasi	Pemenuhan persyaratan untuk laboratorium terakreditasi dan teregistrasi	Pemenuhan persyaratan untuk laboratorium terakreditasi dan teregistrasi
f	Proses pendaftaran akreditasi - registrasi	Proses pendaftaran akreditasi - registrasi	Proses pendaftaran akreditasi - registrasi	Proses pendaftaran akreditasi - registrasi	Proses pendaftaran akreditasi - registrasi

NO	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
g	Proses assesmen akreditasi - registrasi	Proses assesmen akreditasi - registrasi	Proses assesmen akreditasi - registrasi	- Proses assesmen akreditasi - registrasi	Proses assesmen akreditasi - registrasi
7	UPT PENGELOLAAN TPA-IPLT				
a	TPA				
	Pembangunan TPA Temporary (TPA Sementara) Tahap 2	Operasional TPA Temporary (TPA Sementara)	Operasional TPA Temporary (TPA Sementara)	Operasional TPA Temporary (TPA Sementara)	Operasional TPA Temporary (TPA Sementara)
	Pembangunan Lahan Urug Residu	Persiapan Operasional Lahan Urug Residu	Operasional Lahan Urug Residu	Operasional Lahan Urug Residu	Operasional Lahan Urug Residu
	Pembangunan TPST	Pembangunan TPST	Operasional TPST	Operasional TPST	Operasional TPST
		Persiapan Operasional TPST	Peningkatan Kapasitas SDM untuk pengelola TPST baik administratif maupun teknis termasuk kegiatan kaji banding	Pengembangan TPST ke arah pengelolaan Zero Waste	Pembangunan TPST ke arah pengelolaan Zero Waste
					Operasional TPST Zero Waste
b	IPLT				
	Operasional IPLT	Operasional IPLT	Operasional IPLT	Operasional IPLT	Operasional IPLT
	Pengembangan IPLT	Penambahan personil IPLT sebanyak 10 orang	Penambahan Truk tangki tinja kapasitas 4000 liter	Pelaksanaan Pelayanan L2T3 dan L2T2	Pelaksanaan Pelayanan L2T3 dan L2T2
	Penambahan Truk tangki tinja kapasitas 4000 liter	Peningkatan Kapasitas SDM untuk pengelola IPLT baik administratif maupun teknis termasuk kegiatan kaji banding	Sosialisasi secara luas kepada masyarakat terkait informasi pelayanan L2T2 dan L2T3	Peningkatan Kapasitas SDM untuk pengelola IPLT baik administratif maupun teknis termasuk kegiatan kaji banding	Penambahan Truk tangki tinja kapasitas 4000 liter
	Koordinasi dengan stakeholder terkait pemahaman sanitasi aman dan strategi pencapaiannya	Koordinasi dengan stakeholder terkait pemahaman sanitasi aman dan strategi pencapaiannya	Pelaksanaan Pelayanan L2T3 dan L2T2		
	Sosialisasi secara luas kepada masyarakat terkait informasi pelayanan L2T2 dan L2T3	Sosialisasi secara luas kepada masyarakat terkait informasi pelayanan L2T2 dan L2T3			
	Pelaksanaan Pelayanan L2T3 dan L2T2	Pelaksanaan Pelayanan L2T3 dan L2T2			

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Keterangan
1	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan melalui: penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan pekerjaan umum; penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas	- Peningkatan akses sanitasi aman dan layak - Meningkatnya kawasan permukiman dan perumahan layak huni - Meningkatnya jumlah rumah layak huni - Meningkatnya kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga - Peningkatan fasilitasi hunian sementara bagi warga yang belum memiliki tempat tinggal - Rehabilitasi dan penataan alon-alon - Terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum - Terfasilitasinya pelaksanaan Reforma Agraria	
2	Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan	Meningkatkan ketahanan lingkungan hidup terhadap perubahan iklim dan bencana melalui: Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui integrasi hulu-hilir sistem pengelolaan persampahan, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta pengendalian pencemaran yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi bencana	- Peningkatan persetujuan lingkungan dalam rangka perijinan berusaha yang berwawasan lingkungan - Peningkatan kualitas air - Peningkatan kualitas udara - Tersedianya laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi di Kabupaten Temanggung - Penurunan emisi GRK (IUP) - Perlindungan sumber mata air - Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air - Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat - Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah - Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Keterangan
			- Percontohan (desa mandiri sampah) pengurangan sampah plastik dan kertas - Aksi bersih lingkungan - Penghijauan di lokasi lahan kritis - Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis - Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis - Peningkatan RTH Publik - Peningkatan sekolah berwawasan lingkungan - Peningkatan penghargaan bidang Lingkungan Hidup	

Berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah Renstra Tahun 2025-2029, sasaran yang harus di wujudkan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung yaitu:

1. Pengelolaan sumber daya alam hayati secara bijak dan kelestarian lingkungan
2. Mitigasi perubahan iklim
3. Mendorong keterlibatan Masyarakat
4. Mendorong gaya hidup ramah lingkungan

Dalam mewujudkan Misi ke-empat Kepala Daerah, DPRKPLH memiliki program prioritas tahun 2025 – 2029 antara lain:

1. Penanganan Lahan Kritis

Upaya yang dilakukan untuk penanganan lahan kritis yaitu dengan distribusi bibit tanaman dan melakukan kegiatan konservasi.

2. Perlindungan Mata Air

Upaya yang dilakukan untuk perlindungan mata air yaitu inventarisasi mata air, kajian catchment area mata air, dan intervensi rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Temanggung.

3. Pengelolaan Sampah Terpadu

Upaya yang dilakukan untuk pengelolaan sampah terpadu dilakukan melalui optimalisasi program desa bebas sampah, pelatihan dan sosialisasi pengelolaan serta pemanfaatan sampah menjadi ekonomis, penataan TPA dan pembangunan TPST.

4. Rehabilitasi dan Penataan Kawasan Alun – alun

Selain itu terdapat beberapa saran dan masukan dari stakeholder terkait antara lain:

1. Penggiat Lingkungan

- Ada kegelisahan dari penggiat lingkungan hidup terkait revitalisasi alun-alun
- Alun-alun dapat dijadikan sebagai ruang tangkap air (kolam retensi)
- Perlunya evaluasi terhadap pembangunan TPSD di desa.

2. Penggiat Persampahan

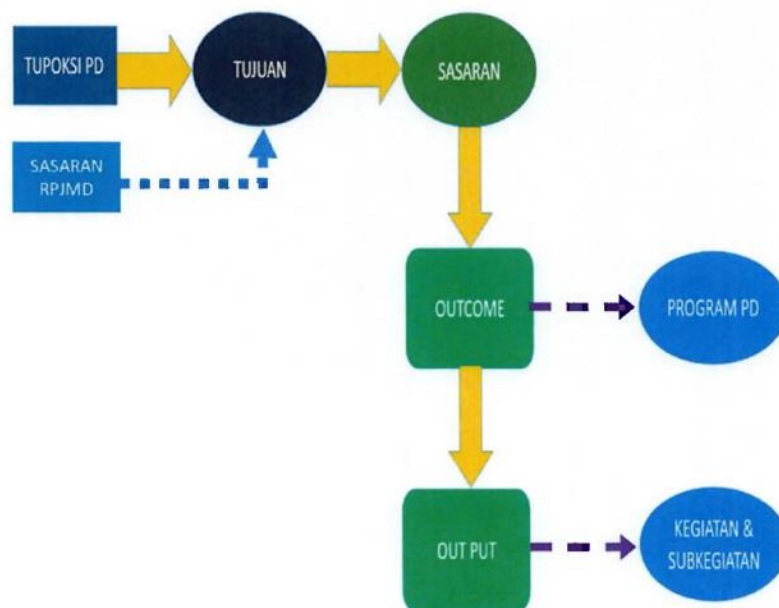
- Pengelolaan sampah harus sesuai dengan pedoman agar dapat berjalan dengan baik karena terdapat kolaborasi antara masyarakat sebagai pihak pengolah dan pemilah sampah dan pemerintah sebagai pengangkut residu
- Konservasi air dapat dilakukan melalui pendekatan kebudayaan bersama masyarakat sebagai upaya penanganan permasalahan air
- Edukasi persampahan atau kampanye persampahan digiatkan kembali.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, DPRKPLH Kabupaten Temanggung akan mengakomodir saran dan masukan tersebut dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan memperhatikan pedoman pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program dan indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1
Program DPRKPLH Kabupaten Temanggung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					9.055.198.000,00		9.061.536.638,00		9.187.491.998,00		9.360.216.847,00		9.366.768.999,00	
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					5.000.000,00		5.003.500,00		5.073.049,00		5.168.422,00		5.172.040,00	
Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R (%)	15,57	16,96	17,30	5.000.000,00	17,65	5.003.500,00	17,99	5.073.049,00	18,34	5.168.422,00	18,69	5.172.040,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					9.050.198.000,00		9.056.533.138,00		9.182.418.949,00		9.355.048.425,00		9.361.596.959,00	
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	3,11	8,06	13,06	9.050.198.000,00	18,06	9.056.533.138,00	23,06	9.182.418.949,00	28,06	9.355.048.425,00	30,46	9.361.596.959,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					16.805.796.452,00		16.963.666.022,00		17.227.081.518,00		17.697.230.145,00		17.652.811.278,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.581.796.902,00		12.686.709.571,00		12.890.675.373,00		13.279.299.563,00		13.231.788.309,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	12.581.796.902,00	100	12.686.709.571,00	100	12.890.675.373,00	100	13.279.299.563,00	100	13.231.788.309,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					829.999.550,00		830.580.550,00		842.125.619,00		857.957.581,00		858.558.151,00	
Meningkatnya Hunian Layak	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100	829.999.550,00	100	830.580.550,00	100	842.125.619,00	100	857.957.581,00	100	858.558.151,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM) (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					3.394.000.000,00		3.446.375.901,00		3.494.280.526,00		3.559.973.001,00		3.562.464.818,00	
Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses	96,31	96,37	96,43	3.394.000.000,00	96,49	3.446.375.901,00	96,55	3.494.280.526,00	96,60	3.559.973.001,00	96,66	3.562.464.818,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	hunian Layak (%)													Kawasan Permukiman
	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	48,80	48,80	48,81		48,82		48,83		48,84		48,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase penanganan rumah tidak layak huni (%)	64,7	66,88	69,06		71,24		73,42		75,6		77,78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga (%)	79,82	79,93	80,03		80,14		80,24		80,35		80,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					14.473.000.000,00		15.379.610.100,00		14.482.186.680,00		7.754.451.790,00		7.759.879.907,00	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					45.000.000,00		45.031.500,00		45.657.438,00		46.515.798,00		46.548.359,00	
Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	100	100	100	45.000.000,00	100	45.031.500,00	100	45.657.438,00	100	46.515.798,00	100	46.548.359,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					220.000.000,00		220.154.000,00		223.214.141,00		227.410.566,00		227.569.754,00	
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Angka)	46,81	60,02	60,03	220.000.000,00	60,04	220.154.000,00	60,05	223.214.141,00	60,06	227.410.566,00	60,07	227.569.754,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Luas Lahan kritis tertangani (Ha)	-	3,75	4		4,25		4,5		4,75		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola (%)	7,08	7,08	7,40		7,71		8,02		8,33		8,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung (%)	-	20,9	23,3		25,6		27,9		30,2		32,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung (%)	-	15,7	15,7		15,7		17,6		17,6		19,6		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					7.330.000.000,00		8.231.610.000,00		7.234.829.379,00		370.844.171,00		371.103.762,00	
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara (%)	73,61	74,00	80	7.330.000.000,00	85	8.231.610.000,00	95	7.234.829.379,00	95	370.844.171,00	100	371.103.762,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN					10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.007.000,00	100	10.146.097,00	100	10.336.844,00	100	10.344.080,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					20.000.000,00		20.014.000,00		20.292.195,00		20.673.688,00		20.688.159,00	
Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan (%)	28,93	30,26	30,93	20.000.000,00	31,60	20.014.000,00	32,26	20.292.195,00	32,93	20.673.688,00	33,60	20.688.159,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN					10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.007.000,00	100	10.146.097,00	100	10.336.844,00	100	10.344.080,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00	
Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.007.000,00	100	10.146.097,00	100	10.336.844,00	100	10.344.080,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					6.828.000.000,00		6.832.779.600,00		6.927.755.236,00		7.057.997.035,00		7.062.937.633,00	
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	32,98	33,34	34,14	6.828.000.000,00	34,94	6.832.779.600,00	35,74	6.927.755.236,00	40,00	7.057.997.035,00	45,00	7.062.937.633,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase sampah yang terkelola (%)	62,91	63,27	64,07		64,87		65,67		66,47		67,27		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Cakupan Layanan Persampahan (%)	74,39	76,12	77,85		79,58		81,31		83,04		84,78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
TOTAL KESELURUHAN					40.333.994.452		41.404.812.760		40.896.760.196		34.811.898.782		34.779.460.184	

Berdasarkan tabel 4.1. dalam rangka mendukung pencapaian visi TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif dan Aman) dan tercapainya tujuan mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman, DPRKPLH masuk dalam Misi dan Sasaran sebagai berikut:

1. Misi ke-1 Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas dengan Tujuan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi, serta Menjamin Keadilan Sosial. Sasaran yang selaras dengan Tupoksi DPRKPLH pada misi tersebut yaitu Sasaran ke-2 “Menghubungkan konektivitas daerah terpencil dengan layanan dasar. Strategi dalam mencapai tujuan dilaksanakan melalui Pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas wilayah. Dalam pelaksanaannya, urusan yang selaras dengan misi tersebut di atas yaitu urusan pekerjaan umum serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2. Misi ke-4 “Mempromosikan Kelestarian Lingkungan” dengan Tujuan melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan keberlanjutan pembangunan. Berdasarkan tujuan tersebut maka maka dirumuskan sasaran yang harus diwujudkan yaitu :
 - a. Pengelolaan sumber daya alam hayati secara bijak dan kelestarian lingkungan
 - b. Mitigasi perubahan iklim
 - c. Mendorong keterlibatan masyarakat
 - d. Mendorong gaya hidup ramah lingkungan.

Strategi dalam mencapai tujuan dilaksanakan melalui Pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sampah secara terpadu. Dalam pelaksanaannya urusan yang selaras dengan misi tersebut, yaitu urusan lingkungan hidup.

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2025, DPRKPLH merumuskan Tujuan yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman serta Ketahanan terhadap Perubahan Iklim dengan Sasaran yang akan dicapai yaitu:

1. Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
3. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan tersebut, maka pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2025-2029, DPRKPLH Kabupaten Temanggung akan melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3. Program Pengembangan Perumahan
4. Program Kawasan Permukiman
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
6. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
7. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
8. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
9. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
10. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
11. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
12. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
13. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
14. Program Pengelolaan Persampahan.

Program-program tersebut kemudian dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan penjabaran pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan
DPRKPLH Kabupaten Temanggung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
1.04.2.11.1.03.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup							
Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman serta ketahanan terhadap perubahan iklim	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik			Indeks Kualitas Air (IKA) (Angka)		
					Indeks Kualitas Udara (IKU) (Angka)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)		
					Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.04.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (TON CO2 EQ)		
					Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup (%)	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Kabupaten/Kota yang disusun			
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
			Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Angka)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Luas Lahan kritis tertangani (Ha)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola (%)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung (%)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung (%)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan	2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
				Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi	
				Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara (%)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
					Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Temanggung yang telah memiliki dokumen lingkungan baik SPPL, UKL-UPL, maupun AMDAL yang wewenanganya berada di Pemerintah Kabupaten Temanggung	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan (%)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	
					Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup (%)	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Terfasilitasinya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengelolaan Persampahan		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase sampah yang terkelola (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Cakupan Layanan Persampahan (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Terlaksananya pengelolaan sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)		
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
		Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman			Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman (%)		
			Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		Persentase jumlah TPS 3R (%)	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
				Terlaksananya pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
			Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) (%)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Terlaksananya pembangunan untuk pengelolaan sistem air limbah domestik	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya Hunian Layak		Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
					Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
					Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM) (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Terlaksananya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
			Meningkatnya Kawasan Permukiman		Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
					Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
					Persentase penanganan rumah tidak layak huni (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
					Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Terlaksananya pembangunan rumah tidak layak	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				huni menjadi layak huni			
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
					Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
DPRKPLH Kabupaten Temanggung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				9.055.198.000,00		9.061.536.638,00		9.187.491.998,00		9.360.216.847,00		9.366.768.999,00		
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				5.000.000,00		5.003.500,00		5.073.049,00		5.168.422,00		5.172.040,00		
Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R (%)	15,57	17,30	5.000.000,00	17,65	5.003.500,00	17,99	5.073.049,00	18,34	5.168.422,00	18,69	5.172.040,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.003.500,00		5.073.049,00		5.168.422,00		5.172.040,00		
Terlaksananya pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS 3R yang dibangun (Ton/hari)	0	0,5	5.000.000,00	0,5	5.003.500,00	0,5	5.073.049,00	0,5	5.168.422,00	0,5	5.172.040,00		
1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				5.000.000,00		5.003.500,00		5.073.049,00		5.168.422,00		5.172.040,00		
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS 3R yang dibangun (Ton/hari)	0	0,5	5.000.000,00	0,5	5.003.500,00	0,5	5.073.049,00	0,5	5.168.422,00	0,5	5.172.040,00		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				9.050.198.000,00		9.056.533.138,00		9.182.418.949,00		9.355.048.425,00		9.361.596.959,00		
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	3,11	13,06	9.050.198.000,00	18,06	9.056.533.138,00	23,06	9.182.418.949,00	28,06	9.355.048.425,00	30,46	9.361.596.959,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) (%)	100	100		100		100		100		100			
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				9.050.198.000,00		9.056.533.138,00		9.182.418.949,00		9.355.048.425,00		9.361.596.959,00		
Terlaksananya pembangunan untuk pengelolaan sistem air limbah domestik	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	0	500	9.050.198.000,00	500	9.056.533.138,00	500	9.182.418.949,00	500	9.355.048.425,00	500	9.361.596.959,00		
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				9.050.198.000,00		9.056.533.138,00		9.182.418.949,00		9.355.048.425,00		9.361.596.959,00		
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	0	500	9.050.198.000,00	500	9.056.533.138,00	500	9.182.418.949,00	500	9.355.048.425,00	500	9.361.596.959,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				16.805.796.452,0		16.963.666.022,00		17.227.081.518,0		17.697.230.145,00		17.652.811.278,0		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.581.796.902,0		12.686.709.571,00		12.890.675.373,0		13.279.299.563,00		13.231.788.309,0		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	12.581.796.902,0 0	100	12.686.709.571,00	100	12.890.675.373,0 0	100	13.279.299.563,00	100	13.231.788.309,0 0	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00		
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00	7	1.500.000,00		
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.990.095.646,00		7.050.008.315,00		7.174.974.117,00		7.528.598.307,00		7.565.087.053,00		
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	123	136	6.990.095.646,00	136	7.050.008.315,00	136	7.174.974.117,00	136	7.528.598.307,00	136	7.565.087.053,00		
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.990.095.646,00		7.050.008.315,00		7.174.974.117,00		7.528.598.307,00		7.565.087.053,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	123	136	6.990.095.646,00	136	7.050.008.315,00	136	7.174.974.117,00	136	7.528.598.307,00	136	7.565.087.053,00		
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				96.000.000,00		103.000.000,00		116.000.000,00		124.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik	12	12	96.000.000,00	12	103.000.000,00	12	116.000.000,00	12	124.000.000,00	12	125.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Kantor yang Disediakan (Paket)													
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12							
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12							
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12							
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	6.000.000,00	12	7.000.000,00	12	8.000.000,00	12	9.000.000,00	12	9.000.000,00		
1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000,00		21.000.000,00		24.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	20.000.000,00	12	21.000.000,00	12	24.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00		
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00	12	23.000.000,00		
1.04.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				20.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	22.000.000,00	12	23.000.000,00	12	23.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	30.000.000,00	12	35.000.000,00	12	40.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00		
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				40.000.000,00		53.000.000,00		60.000.000,00		55.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4	40.000.000,00	3	53.000.000,00	3	60.000.000,00	4	55.000.000,00	2	45.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	23		8		6		4		4			
1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				15.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	23	15.000.000,00	8	25.000.000,00	6	30.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000,00		28.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4	25.000.000,00	3	28.000.000,00	3	30.000.000,00	4	35.000.000,00	2	25.000.000,00		
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.284.201.256,00		5.289.701.256,00		5.295.201.256,00		5.300.201.256,00		5.300.201.256,00		
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	5.284.201.256,00	12	5.289.701.256,00	12	5.295.201.256,00	12	5.300.201.256,00	12	5.300.201.256,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	12		12		12		12					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Disediakan (Laporan)													
1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.500.000,00	12	2.000.000,00	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00		
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	105.000.000,00	12	110.000.000,00	12	115.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00		
1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.177.701.256,00		5.177.701.256,00		5.177.701.256,00		5.177.701.256,00		5.177.701.256,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	5.177.701.256,00	12	5.177.701.256,00	12	5.177.701.256,00	12	5.177.701.256,00	12	5.177.701.256,00		
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.000.000,00		189.500.000,00		243.000.000,00		270.000.000,00		195.000.000,00		
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	24	170.000.000,00	24	189.500.000,00	24	243.000.000,00	24	270.000.000,00	24	195.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	13	12		12		12		12		12			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)													
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				90.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	24	90.000.000,00	24	100.000.000,00	24	105.000.000,00	24	105.000.000,00	24	105.000.000,00		
1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000,00		77.500.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	1	1	70.000.000,00	1	77.500.000,00	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00	1	75.000.000,00		
1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	13	12	10.000.000,00	12	12.000.000,00	12	13.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				829.999.550,00		830.580.550,00		842.125.619,00		857.957.581,00		858.558.151,00		
Meningkatnya Hunian Layak	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik (%)	100	100	829.999.550,00	100	830.580.550,00	100	842.125.619,00	100	857.957.581,00	100	858.558.151,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM) (%)	100	100		100		100		100		100			
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				30.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana	0	0	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Kabupaten/Kota (Dokumen)													
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				799.999.550,00		800.580.550,00		812.125.619,00		827.957.581,00		828.558.151,00		
Terlaksananya pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	72	72	799.999.550,00	72	800.580.550,00	72	812.125.619,00	72	827.957.581,00	72	828.558.151,00		
1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				799.999.550,00		800.580.550,00		812.125.619,00		827.957.581,00		828.558.151,00		
Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	72	72	799.999.550,00	72	800.580.550,00	72	812.125.619,00	72	827.957.581,00	72	828.558.151,00		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				3.394.000.000,00		3.446.375.901,00		3.494.280.526,00		3.559.973.001,00		3.562.464.818,00		
Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak (%)	96,31	96,43	3.394.000.000,00	96,49	3.446.375.901,00	96,55	3.494.280.526,00	96,60	3.559.973.001,00	96,66	3.562.464.818,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	48,80	48,81		48,82		48,83		48,84		48,85			
	Persentase penanganan rumah tidak layak huni (%)	64,7	69,06		71,24		73,42		75,6		77,78			
	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga (%)	79,82	80,03		80,14		80,24		80,35		80,45			
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				3.394.000.000,00		3.446.375.901,00		3.494.280.526,00		3.559.973.001,00		3.562.464.818,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	308	160	3.394.000.000,00	100	3.446.375.901,00	100	3.494.280.526,00	100	3.559.973.001,00	100	3.562.464.818,00		
	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	0	0		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	0	0		10		10		10		10			
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				3.394.000.000,00		2.446.375.901,00		2.494.280.526,00		2.559.973.001,00		2.562.464.818,00		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	308	160	3.394.000.000,00	100	2.446.375.901,00	100	2.494.280.526,00	100	2.559.973.001,00	100	2.562.464.818,00		
1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	0	0	0,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00		
1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan	0	0	0,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00	10	500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)													
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				14.473.000.000,0 0		15.379.610.100,00		14.482.186.680,0 0		7.754.451.790,00		7.759.879.907,00		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				45.000.000,00		45.031.500,00		45.657.438,00		46.515.798,00		46.548.359,00		
Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	100	100	45.000.000,00	100	45.031.500,00	100	45.657.438,00	100	46.515.798,00	100	46.548.359,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup (%)	100	100		100		100		100		100			
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				45.000.000,00		45.031.500,00		45.657.438,00		46.515.798,00		46.548.359,00		
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkun gan Hidup Daerah (DIKPLHD)	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	45.000.000,00	1	45.031.500,00	1	45.657.438,00	1	46.515.798,00	1	46.548.359,00		
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksana an RPPLH Kabupaten/Kota				45.000.000,00		45.031.500,00		45.657.438,00		46.515.798,00		46.548.359,00		
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	45.000.000,00	1	45.031.500,00	1	45.657.438,00	1	46.515.798,00	1	46.548.359,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)													
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				0		0		0		0		0		
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				0		0		0		0		0		
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				220.000.000,00		220.154.000,00		223.214.141,00		227.410.566,00		227.569.754,00		
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Angka)	46,81	60,03	220.000.000,00	60,04	220.154.000,00	60,05	223.214.141,00	60,06	227.410.566,00	60,07	227.569.754,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Luas Lahan kritis tertangani (Ha)	-	4		4,25		4,5		4,75		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola (%)	7,08	7,40		7,71		8,02		8,33		8,65			
	Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung (%)	-	23,3		25,6		27,9		30,2		32,6			
	Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung (%)	-	15,7		15,7		17,6		17,6		19,6			
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				130.000.000,00		130.000.000,00		132.214.141,00		134.410.566,00		134.569.754,00		
Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	132.214.141,00	1	134.410.566,00	1	134.569.754,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	25	25		25		25		25		25			
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				30.000.000,00		30.000.000,00		31.214.141,00		32.410.566,00		32.569.754,00		
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	31.214.141,00	1	32.410.566,00	1	32.569.754,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)													
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				100.000.000,00		100.000.000,00		101.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	25	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	101.000.000,00	25	102.000.000,00	25	102.000.000,00		
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				90.000.000,00		90.154.000,00		91.000.000,00		93.000.000,00		93.000.000,00		
Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	64,65	4	90.000.000,00	4,25	90.154.000,00	4,5	91.000.000,00	4,75	93.000.000,00	5	93.000.000,00		
2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi				90.000.000,00		90.154.000,00		91.000.000,00		93.000.000,00		93.000.000,00		
kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	64,65	4	90.000.000,00	4,25	90.154.000,00	4,5	91.000.000,00	4,75	93.000.000,00	5	93.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				7.330.000.000,00		8.231.610.000,00		7.234.829.379,00		370.844.171,00		371.103.762,00		
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara (%)	73,61	80	7.330.000.000,00	85	8.231.610.000,00	95	7.234.829.379,00	95	370.844.171,00	100	371.103.762,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				7.330.000.000,00		8.231.610.000,00		7.234.829.379,00		370.844.171,00		371.103.762,00		
Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	8,62	18,27	7.330.000.000,00	18,27	8.231.610.000,00	18,27	7.234.829.379,00	18,27	370.844.171,00	18,27	371.103.762,00		
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				7.330.000.000,00		8.231.610.000,00		7.234.829.379,00		370.844.171,00		371.103.762,00		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	8,62	18,27	7.330.000.000,00	18,27	8.231.610.000,00	18,27	7.234.829.379,00	18,27	370.844.171,00	18,27	371.103.762,00		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (%)	100	100	10.000.000,00	100	10.007.000,00	100	10.146.097,00	100	10.336.844,00	100	10.344.080,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi	100	100				100		100					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	menimbulkan pencemaran air (%)													
	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara (%)	100	100		100		100		100		100			
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00		
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Temanggung yang telah memiliki dokumen lingkungan baik SPPL, UKL-UPL, maupun AMDAL yang wewenangnya berada di Pemerintah Kabupaten Temanggung	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	50	50	10.000.000,00	50	10.007.000,00	50	10.146.097,00	50	10.336.844,00	50	10.344.080,00		
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	50	50	10.000.000,00	50	10.007.000,00	50	10.146.097,00	50	10.336.844,00	50	10.344.080,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				20.000.000,00		20.014.000,00		20.292.195,00		20.673.688,00		20.688.159,00		
Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan (%)	28,93	30,93	20.000.000,00	31,60	20.014.000,00	32,26	20.292.195,00	32,93	20.673.688,00	33,60	20.688.159,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.014.000,00		20.292.195,00		20.673.688,00		20.688.159,00		
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komuni tas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	0	5	20.000.000,00	5	20.014.000,00	5	20.292.195,00	5	20.673.688,00	5	20.688.159,00		
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelo mpok masyarakat				20.000.000,00		20.014.000,00		20.292.195,00		20.673.688,00		20.688.159,00		
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelo mpok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komuni tas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	0	5	20.000.000,00	5	20.014.000,00	5	20.292.195,00	5	20.673.688,00	5	20.688.159,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00		
Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup (%)	100	100	10.000.000,00	100	10.007.000,00	100	10.146.097,00	100	10.336.844,00	100	10.344.080,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00		
Terfasilitasinya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro phi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	1	3	10.000.000,00	3	10.007.000,00	3	10.146.097,00	3	10.336.844,00	3	10.344.080,00		
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro phi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	1	3	10.000.000,00	3	10.007.000,00	3	10.146.097,00	3	10.336.844,00	3	10.344.080,00		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100	100	10.000.000,00	100	10.007.000,00	100	10.146.097,00	100	10.336.844,00	100	10.344.080,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00		
Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikel ola (Pengaduan)	0	1	10.000.000,00	1	10.007.000,00	1	10.146.097,00	1	10.336.844,00	1	10.344.080,00		
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.007.000,00		10.146.097,00		10.336.844,00		10.344.080,00		
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikel ola (Pengaduan)	0	1	10.000.000,00	1	10.007.000,00	1	10.146.097,00	1	10.336.844,00	1	10.344.080,00		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				6.828.000.000,00		6.832.779.600,00		6.927.755.236,00		7.057.997.035,00		7.062.937.633,00		
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	32,98	34,14	6.828.000.000,00	34,94	6.832.779.600,00	35,74	6.927.755.236,00	40,00	7.057.997.035,00	45,00	7.062.937.633,00	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													dan Lingkungan Hidup	
	Persentase sampah yang terkelola (%)	62,91	64,07		64,87		65,67		66,47		67,27			
	Cakupan Layanan Persampahan (%)	74,39	77,85		79,58		81,31		83,04		84,78			
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				6.828.000.000,00		6.832.779.600,00		6.927.755.236,00		7.057.997.035,00		7.062.937.633,00		
Terlaksananya pengelolaan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	5		6.828.000.000,00		6.832.779.600,00		6.927.755.236,00		7.057.997.035,00		7.062.937.633,00		
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	93.204,56	51.217,5		51.418,9		52.120,3		52.821,8		53.523,1			
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupate n/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	0	45.000				46.000				46.500			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	215	10		10		10		10		10			
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	215	10	80.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	5		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				1.798.000.000,00		1.954.700.062,00		2.054.070.393,00		2.153.206.917,00		2.253.174.162,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	93.204,56	51.217,5	1.798.000.000,00	51.418,9	1.954.700.062,00	52.120,3	2.054.070.393,00	52.821,8	2.153.206.917,00	53.523,1	2.253.174.162,00		
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				4.950.000.000,00		4.778.079.538,00		4.773.684.843,00		4.804.790.118,00		4.709.763.471,00		
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupate n/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	0	45.000	4.950.000.000,00	46.000	4.778.079.538,00	46.500	4.773.684.843,00	47.000	4.804.790.118,00	47.500	4.709.763.471,00		
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				9.055.198.000		9.061.536.638		9.187.491.998		9.360.216.847		9.366.768.999		
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				5.000.000		5.003.500		5.073.049		5.168.422		5.172.040		
Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah TPS 3R (%)	15,57	17,3	5.000.000	17,65	5.003.500	17,99	5.073.049	18,34	5.168.422	18,69	5.172.040	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000		5.003.500		5.073.049		5.168.422		5.172.040		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS 3R yang dibangun (Ton/hari)	0	0,5	5.000.000	0,5	5.003.500	0,5	5.073.049	0,5	5.168.422	0,5	5.172.040		
1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				5.000.000		5.003.500		5.073.049		5.168.422		5.172.040		
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS 3R yang dibangun (Ton/hari)	0	0,5	5.000.000	0,5	5.003.500	0,5	5.073.049	0,5	5.168.422	0,5	5.172.040		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				9.050.198.000		9.056.533.138		9.182.418.949		9.355.048.425		9.361.596.959		
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	3,11	13,06	9.050.198.000	18,06	9.056.533.138	23,06	9.182.418.949	28,06	9.355.048.425	30,46	9.361.596.959	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) (%)	100	100		100		100		100		100			
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				9.050.198.000		9.056.533.138		9.182.418.949		9.355.048.425		9.361.596.959		
Terlaksananya pembangunan untuk pengelolaan sistem air limbah domestik	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÂ³/Hari)	0	500	9.050.198.000	500	9.056.533.138	500	9.182.418.949	500	9.355.048.425	500	9.361.596.959		
1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				9.050.198.000		9.056.533.138		9.182.418.949		9.355.048.425		9.361.596.959		
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah	0	500	9.050.198.000	500	9.056.533.138	500	9.182.418.949	500	9.355.048.425	500	9.361.596.959		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (MÂ³/Hari)													
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				16.805.796.452		16.963.666.022		17.227.081.518		17.697.230.144,55		17.652.811.278		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.581.796.902		12.686.709.571		12.890.675.373		13.279.299.563		13.231.788.309		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (%)	100	100	12.581.796.902	100	12.686.709.571	100	12.890.675.373	100	13.279.299.563	100	13.231.788.309	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000		
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000	7	1.500.000		
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.990.095.646		7.050.008.315		7.174.974.117		7.528.598.307		7.565.087.053		
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	123	136	6.990.095.646	136	7.050.008.315	136	7.174.974.117	136	7.528.598.307	136	7.565.087.053		
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.990.095.646		7.050.008.315		7.174.974.117		7.528.598.307		7.565.087.053		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	123	136	6.990.095.646	136	7.050.008.315	136	7.174.974.117	136	7.528.598.307	136	7.565.087.053		
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				96.000.000		103.000.000		116.000.000		124.000.000		125.000.000		
Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	96.000.000	12	103.000.000	12	116.000.000	12	124.000.000	12	125.000.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12	12	12	12							
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	12	12	12							
	1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		9.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	6.000.000	12	7.000.000	12	8.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000		
1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		21.000.000		24.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	20.000.000	12	21.000.000	12	24.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000		
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000		20.000.000		22.000.000		22.000.000		23.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	12	23.000.000		
1.04.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				20.000.000		20.000.000		22.000.000		23.000.000		23.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	22.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000		
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		45.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000		
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				40.000.000		53.000.000		60.000.000		55.000.000		45.000.000		
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4	40.000.000	3	53.000.000	3	60.000.000	4	55.000.000	2	45.000.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	23		8		6		4		4			
1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				15.000.000		25.000.000		30.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	23	15.000.000	8	25.000.000	6	30.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000		
1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		28.000.000		30.000.000		35.000.000		25.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	4	25.000.000	3	28.000.000	3	30.000.000	4	35.000.000	2	25.000.000		
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.284.201.256		5.289.701.256		5.295.201.256		5.300.201.256		5.300.201.256		
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	5.284.201.256	12	5.289.701.256	12	5.295.201.256	12	5.300.201.256	12	5.300.201.256		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	12				12				12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Surat Menyurat (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		2.000.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.500.000	12	2.000.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000		
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				105.000.000		110.000.000		115.000.000		120.000.000		120.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	105.000.000	12	110.000.000	12	115.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000		
1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.177.701.256		5.177.701.256		5.177.701.256		5.177.701.256		5.177.701.256		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	5.177.701.256	12	5.177.701.256	12	5.177.701.256	12	5.177.701.256	12	5.177.701.256		
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.000.000		189.500.000		243.000.000		270.000.000		195.000.000		
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	24	170.000.000	24	189.500.000	24	243.000.000	24	270.000.000	24	195.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	13	12		12		12		12					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				90.000.000		100.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	24	90.000.000	24	100.000.000	24	105.000.000	24	105.000.000	24	105.000.000		
1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				70.000.000		77.500.000		125.000.000		150.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	70.000.000	1	77.500.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	75.000.000		
1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	13	12	10.000.000	12	12.000.000	12	13.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				829.999.550		830.580.550		842.125.619		857.957.581		858.558.151		
Meningkatnya Hunian Layak	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas	100	100	829.999.550	100	830.580.550	100	842.125.619	100	857.957.581	100	858.558.151	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	penyediaan rumah yang layak huni (SPM) (%)												Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (%)	100	100		100		100		100					
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Dokumen)	0	0	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				30.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	30.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Kabupaten/Kota (Dokumen)													
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				799.999.550		800.580.550		812.125.619		827.957.581		828.558.151		
Terlaksananya pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	72	72	799.999.550	72	800.580.550	72	812.125.619	72	827.957.581	72	828.558.151		
1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				799.999.550		800.580.550		812.125.619		827.957.581		828.558.151		
Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	72	72	799.999.550	72	800.580.550	72	812.125.619	72	827.957.581	72	828.558.151		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				3.394.000.000		3.446.375.901		3.494.280.526		3.559.973.000,55		3.562.464.818		
Meningkatnya Kawasan Permukiman	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga (%)	79,82	80,03	3.394.000.000	80,14	3.446.375.901	80,24	3.494.280.526	80,35	3.559.973.000,55	80,45	3.562.464.818	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Persentase penanganan rumah tidak layak huni (%)	64,7	69,06		71,24		73,42		75,6		77,78			
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak (%)	96,31	96,43		96,49		96,55		96,6		96,66			
	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani (%)	48,8	48,81		48,82		48,83		48,84		48,85			
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				3.394.000.000		3.446.375.901		3.494.280.526		3.559.973.000,55		3.562.464.818		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	308	160	3.394.000.000	100	3.446.375.901	100	3.494.280.526	100	3.559.973.000,55	100	3.562.464.818		
	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	0	0		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	0	0		10		10		10		10			
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				3.394.000.000		2.446.375.901		2.494.280.526		2.559.973.000,55		2.562.464.818		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	308	160	3.394.000.000	100	2.446.375.901	100	2.494.280.526	100	2.559.973.000,55	100	2.562.464.818		
1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				0		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	0	0	0	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000		
1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				0		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan	0	0	0	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)													
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				14.473.000.000		15.379.610.100		14.482.186.680		7.754.451.790		7.759.879.907		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				45.000.000		45.031.500		45.657.438		46.515.798		46.548.359		
Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup (%)	100	100	45.000.000	100	45.031.500	100	45.657.438	100	46.515.798	100	46.548.359	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	100	100		100		100		100		100			
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				45.000.000		45.031.500		45.657.438		46.515.798		46.548.359		
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	45.000.000	1	45.031.500	1	45.657.438	1	46.515.798	1	46.548.359		
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				45.000.000		45.031.500		45.657.438		46.515.798		46.548.359		
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	45.000.000	1	45.031.500	1	45.657.438	1	46.515.798	1	46.548.359		
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)													
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				0		0		0		0		0		
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				0		0		0		0		0		
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				220.000.000		220.154.000		223.214.141		227.410.566		227.569.754		
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Angka)	46,81	60,03	220.000.000	60,04	220.154.000	60,05	223.214.141	60,06	227.410.566	60,07	227.569.754	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung (%)	-	15,7		15,7		17,6		17,6		19,6			
	Persentase titik pemantauan	-	23,3		25,6		27,9		30,2		32,6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	kualitas air permukaan di Kab Temanggung (%)													
	Luas Lahan kritis tertangani (Ha)	-	4		4,25		4,5		4,75		5			
	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola (%)	7,08	7,4		7,71		8,02		8,33		8,65			
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				130.000.000		130.000.000		132.214.141		134.410.566		134.569.754		
Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1	1	130.000.000	1	130.000.000	1	132.214.141	1	134.410.566	1	134.569.754		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	1				1				1			
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	25	25		25		25		25		25			
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				30.000.000		30.000.000		31.214.141		32.410.566		32.569.754		
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	31.214.141	1	32.410.566	1	32.569.754		
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				100.000.000		100.000.000		101.000.000		102.000.000		102.000.000		
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	25	25	100.000.000	25	100.000.000	25	101.000.000	25	102.000.000	25	102.000.000		
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				90.000.000		90.154.000		91.000.000		93.000.000		93.000.000		
Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	64,65	4	90.000.000	4,25	90.154.000	4,5	91.000.000	4,75	93.000.000	5	93.000.000		
2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi				90.000.000		90.154.000		91.000.000		93.000.000		93.000.000		
kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	64,65	4	90.000.000	4,25	90.154.000	4,5	91.000.000	4,75	93.000.000	5	93.000.000		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				7.330.000.000		8.231.610.000		7.234.829.379		370.844.171		371.103.762		
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH publik kabupaten yang terpelihara (%)	73,61	80	7.330.000.000	85	8.231.610.000	95	7.234.829.379	95	370.844.171	100	371.103.762	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat,	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				7.330.000.000		8.231.610.000		7.234.829.379		370.844.171		371.103.762		
Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	8,62	18,27	7.330.000.000	18,27	8.231.610.000	18,27	7.234.829.379	18,27	370.844.171	18,27	371.103.762		
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				7.330.000.000		8.231.610.000		7.234.829.379		370.844.171		371.103.762		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	8,62	18,27	7.330.000.000	18,27	8.231.610.000	18,27	7.234.829.379	18,27	370.844.171	18,27	371.103.762		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara (%)	100	100	10.000.000	100	10.007.000	100	10.146.097	100	10.336.844	100	10.344.080	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (%)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Temanggung yang telah memiliki dokumen lingkungan baik SPPL, UKL-UPL, maupun AMDAL yang wewenangnya berada di Pemerintah Kabupaten Temanggung	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	50	50	10.000.000	50	10.007.000	50	10.146.097	50	10.336.844	50	10.344.080		
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	50	50	10.000.000	50	10.007.000	50	10.146.097	50	10.336.844	50	10.344.080		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				20.000.000		20.014.000		20.292.195		20.673.688		20.688.159		
Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan (%)	28,93	30,93	20.000.000	31,6	20.014.000	32,26	20.292.195	32,93	20.673.688	33,6	20.688.159	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
													Lingkungan Hidup	
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000		20.014.000		20.292.195		20.673.688		20.688.159		
Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komuni- tas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	0	5	20.000.000	5	20.014.000	5	20.292.195	5	20.673.688	5	20.688.159		
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelo- mpok masyarakat				20.000.000		20.014.000		20.292.195		20.673.688		20.688.159		
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelo- mpok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komuni- tas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	0	5	20.000.000	5	20.014.000	5	20.292.195	5	20.673.688	5	20.688.159		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		
Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup (%)	100	100	10.000.000	100	10.007.000	100	10.146.097	100	10.336.844	100	10.344.080	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		
Terfasilitasinya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	1	3	10.000.000	3	10.007.000	3	10.146.097	3	10.336.844	3	10.344.080		
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	1	3	10.000.000	3	10.007.000	3	10.146.097	3	10.336.844	3	10.344.080		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		
Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100	100	10.000.000	100	10.007.000	100	10.146.097	100	10.336.844	100	10.344.080	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	0	1	10.000.000	1	10.007.000	1	10.146.097	1	10.336.844	1	10.344.080		
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				10.000.000		10.007.000		10.146.097		10.336.844		10.344.080		
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	0	1	10.000.000	1	10.007.000	1	10.146.097	1	10.336.844	1	10.344.080		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				6.828.000.000		6.832.779.600		6.927.755.236		7.057.997.035		7.062.937.633		
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	32,98	34,14	6.828.000.000	34,94	6.832.779.600	35,74	6.927.755.236	40	7.057.997.035	45	7.062.937.633	1.04.2.11.1.0 3.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Cakupan Layanan Persampahan (%)	74,39	77,85		79,58		81,31		83,04		84,78			
	Persentase sampah yang terkelola (%)	62,91	64,07		64,87		65,67		66,47		67,27			
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				6.828.000.000		6.832.779.600		6.927.755.236		7.057.997.035		7.062.937.633		
Terlaksananya pengelolaan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	5		6.828.000.000		6.832.779.600		6.927.755.236		7.057.997.035		7.062.937.633		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)													
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	215	10		10		10		10		10			
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupate n/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	0	45.000		46.000		46.500		47.000		47.500			
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	93.204,56	51.217,5		51.418,9		52.120,3		52.821,8		53.523,1			
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				80.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	215	10	80.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	5		0		0		0		0		0		
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				1.798.000.000		1.954.700.062		2.054.070.393		2.153.206.917		2.253.174.162		
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	93.204,56	51.217,5	1.798.000.000	51.418, 9	1.954.700.062	52.120,3	2.054.070.393	52.821,8	2.153.206.917	53.523, 1	2.253.174.162		
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				4.950.000.000		4.778.079.538		4.773.684.843		4.804.790.118		4.709.763.471		
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan	0	45.000	4.950.000.000	46.000	4.778.079.538	46.500	4.773.684.843	47.000	4.804.790.118	47.500	4.709.763.471		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	akhir sampah di TPA/TPSTkabupate n /kota atau TPA/TPST Regional (Ton)													
Jumlah				40.333.994.452		41.404.812.760		40.896.760.196		34.811.898.782		34.779.460.184		

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui bahwa usulan sumber pendanaan DPRKPLH Kabupaten Temanggung terdiri dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Adapun rincian penganggaran Tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

1	Tahun 2026		
	a. Anggaran Pelaksanaan Program (DAK)	Rp.	9.050.198.000
	b. Anggaran Pelaksanaan Program (DAU)	Rp.	18.701.999.550
	c. Anggaran Penunjang Kegiatan	Rp.	12.581.796.902
	Total	Rp.	40.333.994.452
2	Tahun 2027		
	a. Anggaran Pelaksanaan Program (DAK)	Rp.	9.056.533.138
	b. Anggaran Pelaksanaan Program (DAU)	Rp.	19.661.570.051
	c. Anggaran Penunjang Kegiatan	Rp.	12.686.709.571
	Total	Rp.	41.404.812.760
3	Tahun 2028		
	a. Anggaran Pelaksanaan Program (DAK)	Rp.	9.182.418.949
	b. Anggaran Pelaksanaan Program (DAU)	Rp.	18.823.665.874
	c. Anggaran Penunjang Kegiatan	Rp.	12.890.675.373
	Total	Rp.	40.896.760.196
4	Tahun 2029		
	a. Anggaran Pelaksanaan Program (DAK)	Rp.	9.355.048.425
	b. Anggaran Pelaksanaan Program (DAU)	Rp.	12.177.550.794
	c. Anggaran Penunjang Kegiatan	Rp.	13.279.299.563
	Total	Rp.	34.811.898.782
5	Tahun 2030		
	a. Anggaran Pelaksanaan Program (DAK)	Rp.	9.361.596.959
	b. Anggaran Pelaksanaan Program (DAU)	Rp.	12.186.074.916

c. Anggaran Penunjang Kegiatan	Rp. 13.231.788.309
Total	Rp. 34.779.460.184

Berdasarkan alokasi anggaran di atas, bahwa penganggaran DPRKPLH pada tahun 2026-2028 merupakan penganggaran terbesar karena pada tahun tersebut akan dilaksanakan program prioritas garis imajiner yaitu rehabilitasi dan penataan Pendopo Pengayoman dan alun-alun tahap I dan II.

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten Temanggung

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.04.2.11.1.03.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup				
1.	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA /TPS-3R	
				PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI INFRASTRUKTUR DASAR KEWILAYAHAN
2.	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Penyediaan air bersih dan sanitasi - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota - Operasional IPLT - Pelaksanaan Pelayanan L2T3 dan L2T2 Rencana Pendanaan melalui DAK Bidang Sanitasi dengan rincian sebagai berikut: - Tahun 2026 Rp. 9.050.198.000,- - Tahun 2027 Rp. 9.056.533.138,- - Tahun 2028 Rp. 9.182.418.949,-
			1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				- Tahun 2029 Rp. 9.355.048.425,- - Tahun 2030 Rp. 9.361.596.959,-
3.	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kawasan Permukiman	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	b. Penyediaan rumah layak huni Upaya perbaikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan berbagai pendanaan antara lain BSPS, Bankeu Provinsi, Baznas, APBD dll. Rencana pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung dengan rincian sebagai berikut: - Tahun 2026 Rp. 3.394.000.000,- - Tahun 2027 Rp. 2.446.375.901,- - Tahun 2028 Rp. 2.494.280.526,- - Tahun 2029 Rp. 2.559.973.000,55,- - Tahun 2030 Rp. 2.562.464.818,-
			1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
4.	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP - Penghijauan di lokasi lahan kritis - Membangun kolaborasi dan sinergi multipihak dalam penanganan lahan kritis - Rekayasa penyimpanan air di lokasi lahan kritis - Perlindungan sumber mata air - Pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan air Kegiatan perlindungan mata air antara lain inventarisasi mata air, kajian catchment area mata air, dan intervensi rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Temanggung dengan rencana pendanaan pada sub kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dengan rincian sebagai berikut:
			2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				- Tahun 2026 Rp. 90.000.000 - Tahun 2027 Rp. 90.154.000 - Tahun 2028 Rp. 91.000.000 - Tahun 2029 Rp. 93.000.000 - Tahun 2030 Rp. 93.000.000
5.	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	GARIS IMAJINER Rehabilitasi dan penataan Pendopo Pengayoman dan alun-alun: - Tahun 2026 alokasi anggaran sebesar Rp. 7.330.000.000,- untuk : Penyusunan DED Pendopo Pengayoman, Pembangunan Pendopo Pengayoman, Penyusunan DED Alun-alun Temanggung - Tahun 2027 alokasi anggaran sebesar Rp. 8.231.610.000,- untuk pembangunan Alun-alun Tahap I - Tahun 2028 alokasi anggaran sebesar Rp. 7.234.829.379,- untuk pembangunan Alun-alun Tahap II
			2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
6.	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP - Peningkatan pengelolaan sampah berbasis desa dan masyarakat - Membangun kerjasama dengan multipihak dalam pemasaran produk pengolahan sampah
			2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	c. Percontohan pengurangan sampah plastik dan kertas d. Aksi bersih lingkungan Pembangunan dan penataan kelembagaan TPST - Tahun 2026 Rp. 6.828.000.000 - Tahun 2027 Rp. 6.832.779.600 - Tahun 2028 Rp. 6.927.755.236 - Tahun 2029 Rp. 7.057.997.035 - Tahun 2030 Rp. 7.062.937.633
			2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

Berdasarkan tabel 4.4. diketahui pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung terdapat 6 (enam) program yang mendukung program prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaksanaan program tersebut akan memperhatikan tahapan-tahapan yang telah disusun dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan program prioritas. Dalam rangka mewujudkan kinerja DPRKPLH yang efektif, transparan, dan akuntabel, DPRKPLH menetapkan serta melaksanakan Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis, yang diselaraskan dengan tugas, fungsi DPRKPLH yang tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama DPRKPLH Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	1.04.2.11.1.03.04.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	59,63	74,17	74,27	74,37	74,47	74,57	74,67	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	87,84	85	85,01	85,02	85,03	85,04	85,05	

Berdasarkan tabel di atas terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama DPRKPLH yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan

untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu : pH, TSS, DO, COD, BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform. Proses perhitungan Indeks Kualitas Air melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pemetaan indeks pencemaran air

- Lakukan pemantauan kualitas air sungai,
- Masing-masing titik pemantauan diasumsikan sebagai 1 (satu) data dan akan memiliki status mutu air,
- Pilih 8 parameter (pH, DO, BOD, COD, TSS, TP, Nitrat dan Fecal Coli yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan IKA dan tentukan konsentrasinya dari masing-masing parameter,
- Bandingkan konsentrasi parameter yang telah dipilih dengan nilai kriteria mutu air kelas II yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- Apabila nilai (Ci/Lij) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai (Ci/Lij) baru,
- Setelah didapat angka rata-rata dan maksimalnya dari suatu titik, kemudian diberikan status mutu air.

b. Penentuan nilai IKA

- Hitung jumlah masing-masing status mutu (baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk seluruh lokasi,

- Hitung persentase dari jumlah masing-masing status mutu dengan jumlah totalnya pada wilayah hulu, tengah dan hilir,
- Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat (sesuai P.78 :2013).

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)

$\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{\text{Rata-rata}}^2 + (C_i/L_{ij})_{\text{Maksimum}}^2}{2}}$	Rumus Metode IP : $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat
--	---

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Udara pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKU menyesuaikan perubahan peraturan yang ada yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara dan yang terbaru dengan Indeks Udara Model EU, Sehingga data yang diperoleh pun

berbeda. Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Parameter pencemar udara untuk IKU : SO₂ dan NO₂, Parameter PM 2.5 digunakan sebagai Indikator Kinerja PPU Perkotaan,
- b. Lokasi sampling minimal 4 lokasi per kabupaten/kota :
 - Daerah padat transportasi (jalan utama yang lalu lintasnya padat)
 - Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya),
 - Pemukiman padat penduduk (urban background),
 - Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi,
- c. Metode pemantauan : otomatis dan/atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan,
- d. Jumlah data minimum (frekuensi dan periode pemantauan):
 - Passive sampler minimal : 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali),
 - Manual aktif minimal : 24 hari per tahun (2 kali per bulan@24 jam),
- e. Mengacu pada baku mutu EU yaitu SO₂ = 20 µg/m³ dan NO₂ = 40 µg/m³,
- f. $I_{eu} = 50\% \text{IndeksNO}_2 + 50\% \text{IndeksSO}_2$,
- g. Rumus Indeks Kualitas Udara IKU = Indeks Kualitas Udara
 $= 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$.

Selain target Indikator Kinerja Utama pada DPRKPLH terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPRKPLH yang ditetapkan sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas DPRKPLH. Target tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Selain itu, IKK juga menjadi instrumen strategis dalam menilai efektivitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendorong sinergi lintas sektor guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun target IKK DPRKPLH Tahun 2025-2029 tertuang pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci DPRKPLH Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	1.04.2.11.1.03.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP										
A.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	positif	%	2,30	100	100	100	100	100	100	
B.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.	persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	positif	%	0	48,81	48,82	48,83	48,84	48,85	48,86	
2.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	negatif	%	3,7	3,63	3,57	3,51	3,45	3,40	3,34	
3.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
C.	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
1.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	positif	%	-	100	100	100	100	100	100	
2.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	positif	%	-	100	100	100	100	100	100	
D.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	positif	Angka	68,25	75,46	75,50	75,54	75,59	75,63	75,68	
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	positif	%	62,90	63,27	64,07	64,87	65,67	66,47	67,27	

Berdasarkan tabel 4.6 dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, diketahui terdapat 8 indikator kunci yang selaras dengan urusan dilaksanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan provinsi terdapat program delegasi provinsi ke kabupaten dalam pembangunan tahun 2025–2029 yang merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Melalui mekanisme ini, pemerintah provinsi mendelegasikan sebagian kewenangan dan dukungan program kepada pemerintah kabupaten dengan tujuan memperkuat kapasitas daerah, mempercepat pencapaian target pembangunan, serta menyesuaikan arah kebijakan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Pemerintah provinsi berperan sebagai pengarah kebijakan dan penyedia fasilitasi, sementara pemerintah kabupaten bertindak sebagai pelaksana utama yang memastikan pembangunan berjalan selaras dengan karakteristik wilayahnya. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu mendorong sinergi antar tingkat pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Program Delegasi Provinsi ke Kabupaten Temanggung yang selaras dengan urusan yang dilaksanakan oleh DPRKPLH tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7
Program Delegasi Provinsi ke Kabupaten Temanggung

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni	Meningkatnya Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
2	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	

Berdasarkan tabel 4.7. diketahui pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung terdapat 2 (dua) Program Delegasi Provinsi ke Kabupaten Kota yaitu terkait dengan Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni dan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa. Sedangkan untuk Mandatory Pusat, pada DPRKPLH tidak melaksanakan program tersebut.

Tabel 4.8
Mandatory Pusat

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA DPRKPLH serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Dalam pelaksanaannya, harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA DPRKPLH merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan atau target kinerja sasaran DPRKPLH.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra DPRKPLH yang dijabarkan dalam Renja dan RKA

DPRKPLH harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) DPRKPLH. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja DPRKPLH dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra DPRKPLH ini.

Temanggung, 19 September 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung,



PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196604021989031013